

ABSTRAK

Andri Firmansyah. Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten. (Dibimbing oleh Ir. Deddy S Bratakusumah, BE, MURP, MSc, PhD)

Sebagai salah satu upaya pengejawantahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, di Provinsi Banten adalah penerbitan Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Pada hakekatnya, pelaksanaan pembentukan cabang dinas yang baik merupakan suatu sistem yang mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Penulisan tesis ini dibatasi pada ruang lingkup Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi kebijakan pembentukan cabang dinas pendidikan dan kebudayaan, dengan mengetahui faktor apa saja yang dihadapi (menjadi permasalahan) serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah (solusi) yang ada tersebut. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pembentukan cabang dinas belum terlaksana secara optimal, karena Pergub Banten Nomor 86 Tahun 2016 lebih dahulu terbit sebelum Permendagri Nomor 12 Tahun 2017.

Implementasi Kebijakan Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten didasarkan pada Peraturan Gubernur Banten Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Implementasi Kebijakan Pembentukan Cabang Dinas ini membutuhkan prasyarat dasar, yaitu: (i) adanya sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas, (ii) tersedianya standar operasional prosedur yang baku dan terintegrasi untuk pelaksanaan layanan yang baik, dan (iii) struktur organisasi. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis, dengan menggunakan data (1) histori berupa dokumentasi dan narasi, (2) data studi kepustakaan dan studi dokumenter, dan (3) data lapangan berasal dari responden.

Berdasarkan hasil analisa data, penulis menyimpulkan bahwa prasyarat dasar keberhasilan proses Implementasi Kebijakan Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten sangat dipengaruhi terutama oleh faktor struktur organisasi, sebagaimana yang diamanatkan ketentuan yang berlaku dalam pembentukan cabang dinas. Penulis menyarankan agar dilakukan perbaikan/revisi terhadap proses kebijakan dalam pembentukan Cabang Dinas yang baik.

Kata Kunci : Cabang Dinas, Good Governance

ABSTRACT

Andri Firmansyah. Analisis Implementasi Kebijakan Pembentukan Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Provinsi Banten. (Guided by Ir. Deddy S Bratakusumah, BE, MURP, MSc, PhD)

The issuance of Governor Regulation No. 86 of 2016 on the Establishment of Organization and Administration of Technical Implementation Unit in Banten Provincial Government is one of the efforts to manifest Minister of Home Affairs of Republic Indonesia Regulation Number 12 Year 2017 concerning Guidelines for the Establishment and Classification of Branches and Regional Technical Implementation Unit in Banten Province. In essence, the establishment of a good branch office is a system with a capability of actualizing the principles of good governance.

The writing of this thesis is limited to the scope of Implementation Policy Implementation Analysis Establishment of Branch Office of Education and Culture Tangerang City on Education and Culture Office of Banten Province. The writing of this thesis aims to describe how the implementation process of policy formation of branch education and culture office, by knowing what factors appears as obstacles and the efforts made to solve existing problems. The implementation of good governance principle in the formation of branch offices has not been implemented optimally, because Banten Governor Regulation No. 86 of 2016 was published before Minister of Home Affairs Regulation No. 12 of 2017.

Tangerang City Branch of Education and Culture Office Policy Implementation refers to Banten Governor Regulation No. 86 of 2016 concerning Establishment of Organization and Working Procedure of Technical Implementation Unit within Banten Provincial Government. Branch Office Establishment Policy Implementation requires basic prerequisites, namely: (i) the existence of human resources both quantitatively and quality, (ii) availability of standardized and integrated operational procedures for the implementation of good services, and (iii) organizational structure. This research uses analytical descriptive approach method, using data (1) history in the form of documentation and narration, (2) library study data and documentary study, and (3) field data from respondent.

Based on the data analysis, this research concludes that the basic prerequisite for the success of the Tangerang City Branch Office Establishment Policy Implementation is influenced mainly by the organizational structure factor, as mandated by the provisions in of the branch office formation. This research suggests that the policy implementation process in the formation of an independent procurement services unit needs to be revised in concordance with the regulations.

Keywords: Branch of Education and Culture Office, Good Governance